

KAJIAN SEJARAH KONFRONTASI MALAYSIA

Al Fadhli Darmawansyah¹, Ayu Eltika, Reka Seprina³

Pendidikan Sejarah Universitas Jambi¹²³

alfadhlidarmawansyah1905@gmail.com¹, ayueltika75@gmail.com²

reka.seprina@unja.ac.id³

Abstrak

Konflik antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 dibahas dalam artikel ini. Pada saat itu, Indonesia percaya bahwa aneksasi Malaysia atas wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei ke dalam Federasi Malaysia akan menguntungkan kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh latar belakang Konflik Indonesia-Malaysia yang terjadi antara tahun 1963 hingga 1966. Empat teknik penelitian sejarah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat menantang selama era demokrasi terpimpin. Indonesia berselisih dengan Malaysia akibat taktik agresif Presiden Sukarno yang kala itu bersifat anti-Muslim. Temuan studi tersebut adalah sebagai berikut: Usulan Tengku Abdulrachman untuk membentuk Federasi Malaysia menjadi katalisator permasalahan awal Malaysia. Wacana seputar lingkungan perang dingin yang memecah dunia menjadi Blok Timur dan Barat benar-benar melanda Indonesia. Indonesia berada di garis depan gerakan non-blok dan menentang munculnya kolonialisme baru. Sebagai penentang politik nekolim, Presiden Soekarno menilai pembentukan federasi Malaysia telah membahayakan wilayah Indonesia dan Malaysia adalah contoh intervensi Inggris dalam pembentukan nekolim. Konflik ini mempengaruhi proses pengambilan kebijakan perekonomian Indonesia, karena semua inisiatif perekonomian pemerintah didasarkan pada pertimbangan politik dan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi yang relevan, sehingga mempengaruhi keadaan perekonomian negara.

Kata Kunci: Malaysia, Konfrontasi, Kajian Sejarah

PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan di Indonesia dibagi menjadi empat pemerintahan pada tahun 1961. Kerajaan Brunei dan dua bekas jajahan Inggris, Kalimantan Utara, sering dikenal sebagai Sabah, dan Sarawak, membentuk perbatasan utara. Menyusul sebagian penarikan kolonialnya dari Asia Tenggara, Inggris berusaha membangun Federasi Malaysia dengan menyatukan koloni-koloninya di Kalimantan dan Semenanjung Malaya. Pemerintah Indonesia menolak inisiatif pengembangan FM. Menurut Presiden Soekarno, kemerdekaan Indonesia bisa terancam jika Malaysia hanya berkembang menjadi boneka Inggris dan jika Indonesia bersatu dengan Malaysia, hal ini hanya akan memperkuat dominasi dan kendali Inggris atas Asia Tenggara. Gagasan ini juga ditentang oleh negara-negara tertentu, yaitu Brunei, Singapura, Sarawak, dan Sabah/Kalimantan Utara. Ada faksi pemberontak di Sabah (Kalimantan Utara) yang dipimpin oleh Azahari dari Partai Rakyat. Azahari menjalin kontak dengan front sosialis saat berada di Kuala Lumpur. Singapura mengunjungi Indonesia pada bulan November 1961 dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin sayap kiri. Partai Komunis Indonesia (PKI) mengeluarkan pernyataan pada tanggal 30 Desember 1961 dalam kunjungannya tersebut, menolak pembentukan Federasi Malaysia sebagai “kaki tangan kolonialisme” dan menekankan bahwa bangsa Indonesia juga akan menjunjung tinggi keadilan dan semangat aptriotik. sebagai melakukan perlawanan gagah berani dari penduduk negara tersebut. Kalimantan Utara (Sabah), Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan negara-negara tersebut menentang pembentukan Federasi Malaysia. Dalam kunjungannya, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengeluarkan pernyataan pada tanggal 30 Desember 1961 yang mengecam pendirian Federasi Malaysia sebagai “kaki tangan kolonialisme” dan menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia akan terus menjunjung tinggi keadilan

dan semangat patriotik sebagai seorang pemberani. perlawanan dari rekan senegaranya. Negara-negara tersebut, bersama Kalimantan Utara (Sabah), Malaya, Singapura, Sarawak, dan Brunei, menentang pembentukan Federasi Malaysia. Sikap politik agresif Presiden Soekarno terlihat dari berbagai pidato yang disampaikannya. Presiden Soekarno secara konsisten menyatakan bahwa kekuatan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme adalah musuh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Malaysia, produk sampingan dari neokolonialisme yang mengepung Indonesia dengan basis militer imperialism (Soekarno 1965:409). Gagasan menyatukan wilayah suku Melayu, yaitu Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah, dalam satu nama—Federasi Malaysia—adalah pemicu konflik antara Indonesia dan Malaysia. Tengku Abdulrachman, perdana menteri Malaya, pertama kali mengusulkan konsep ini pada 27 Mei 1961. Tengku Abdulrachman, perdana menteri Malaysia, mengatakan dalam pidatonya bahwa negaranya pada akhirnya perlu mencapai kesepakatan dengan Inggris dan rakyat Malaya. Singapura, Kalimantan Utara, Brunei, dan Sabah agar bisa bertahan sebagai sebuah bangsa (Hendraningrat 1971:3). Kemudian pada tanggal 6 Juli 1963, PM Tengku Abdulracman naik pesawat ke London setelah mendapat laporan dari utusannya yang merupakan wakil PM Tun Abdulrazak. Hanya perwakilan dari Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah yang diizinkan menandatangani perjanjian federasi Malaysia pada tanggal 9 Juli 1963, menurut DEPPEN Republik Indonesia Glora Konfrontasi Mengganyang Malaysia. Pemerintah Indonesia menentang peristiwa ini, dengan alasan bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan komponen neokolonialisme. Sesuai sumpahnya, Indonesia telah bersumpah untuk menolak kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya, dan oleh karena itu, Indonesia dengan tegas menentang hal tersebut. Tentu saja hal ini sejalan dengan sentimen anti-kolonial dan anti-imperialis yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menegaskan bahwa setiap bangsa berhak atas kemerdekaan. Selain itu, klausul pembuka UUD 1945

menegaskan kembali perlunya memberantas kolonialisme dalam segala manifestasinya. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia semakin tidak menerima pembentukan negara federasi Malaysia. Presiden Soekarno menyatakan di depan media Asia-Afrika bahwa masyarakat Sarawak, Brunei, dan Sabah sedang memperjuangkan hak-hak mereka sebagai anggota kekuatan baru yang membenci eksploitasi manusia (Harsono 1989:160).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian sejarah, dengan 4 tingkatan kerja: kritik sumber, interpretasi, interpretasi heuristik, dan historiografi (pembuatan data sejarah). Madjid dan Hamid (2014: 43).

Heuristik, atau mengumpulkan sumber dan mencari catatan, adalah tingkat pertama. Hal ini termasuk mengumpulkan aset tertulis yang mengandung garis-garis kuno beserta sumber daya nomor satu dan sekunder. Peneliti mencari dan mengumpulkan sumber dan statistik yang relevan. Selain itu peneliti mencoba menginventarisasi sumber-sumber dari beberapa sumber tertulis dan buku yang memberikan informasi seputar obyek yang akan dikaji seperti arsip nasional (pidato Presiden Soekarno, pembukaan ganefo di Jakarta tanggal 27 April 1963), arsip nasional (pidato penutupan ganefo di Jakarta tanggal 22 November 1963), Lembaran Negara Republik Indonesia No.30 , No.32 tahun 1966, No.89 tahun 1959, No.238 tahun 1961, Surat Komando tiga DEPPEN RI. Glora Konfrontasi Mengganyang Malaysia. Jakarta: 1964, hal. 144 Ganis Harsono. Generasi Cakrawala Politik Sukarno. Jakarta, tingkat Tahap kedua adalah Kritik Sumber, yaitu mengevaluasi, memilah, dan menemukan sumber untuk memastikan keandalan bahan sejarah yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan setelah mengumpulkan sumber adalah proses kritik sumber melibatkan penggunaan seloko tradisional untuk menganalisis dan

mengeksrak fakta terkait. terdiri dari dua jenis kritik: kritik internal mengacu pada kebenaran isi sumber, sedangkan kritik eksternal berfokus pada keaslian sumber.

Setelah tahap kritik, tahap ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dilakukan dari sumbernya dengan menawarkan interpretasi, analisis, dan pendapat atas informasi yang diperoleh dari literature, publikasi, jurnal, dan tinjauan literatur lengkap.

Historiografi, tata cara penulisan catatan dan penelitian sejarah tingkat terakhir, merupakan langkah keempat. Temuan penelitian pada gelar ini disajikan dalam bentuk tulisan kuno yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Koflik Malaysia-Indonesia

Terjadi perselisihan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1966. Bentrokan ini terjadi menandai dimulainya konflik antara Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, Malaysia dipandang oleh Indonesia sebagai pihak yang melayani kepentingan Inggris di Asia Tenggara. dengan memaksa Brunei, Sarawak, dan Sabah bergabung dengan Federasi Malaysia sebagai pembalasan terhadap Indonesia

Terjadi perselisihan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1966. Bentrokan ini terjadi menandai dimulainya konflik antara Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, Malaysia dipandang oleh Indonesia sebagai pihak yang melayani kepentingan Inggris di Asia Tenggara. dengan memaksa Brunei, Sarawak, dan Sabah bergabung dengan Federasi Malaysia sebagai pembalasan terhadap Indonesia. Ia melakukan tawar-menawar dengan Subandrio, Wakil Menteri Pertama II Republik Indonesia Luar, jika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Hasil negosiasi dengan Marsekal Chen Yi, Wakil Perdana Menteri Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri

Menurut Bank Indonesia, *SEJARAH BANK INDONESIA : MONETER* , Periode 1959-1966, menandakan perjuangan Indonesia melawan Malaysia akan mendapat dukungan penuh dari RRT. Pada tanggal 25 Januari 1965, Subandrio membahas gagasan Inggris membombardir Indonesia dalam perundingan. Dari segi politik luar negeri, Indonesia lebih cenderung mendukung blok timur pada era Demokrasi Terpimpin. Kedekatan Indonesia dengan Rusia dan China memberikan tekanan pada hubungan Indonesia dengan negara-negara di blok barat. Pemerintah kemudian mengambil keputusan keluar dari PBB, Bank Dunia, dan IMF pada 17 Agustus 1965, dengan alasan semangat kemerdekaan dan revolusi. Bersama. Karena penarikan tersebut, terdapat hutang sebesar \$61,9 juta hingga \$63,5 juta kepada IMF. Jumlah ini, yang akan dibayar kembali dalam sepuluh kali pembayaran setiap enam bulan mulai tanggal 17 Februari 1966, sudah termasuk bunga utang. Di permukaan, terdapat surplus transaksi sebesar US\$ 25 juta pada tahun 1959; Meski begitu, terjadi defisit sebesar US\$ 248 juta pada tahun 1965. Transaksi defisit berjalan dengan mantap dan lambat, sehingga mengakibatkan merosotnya nilai rupiah (yang selalu meningkat) dan nilai devisa yang mencapai puncaknya pada tahun 1960 sebesar US\$ 313 juta dan merosot menjadi US\$ 17 juta pada tahun 1967 (saleh,. 2000:20).

Defisit anggaran belanja pemerintah ditutuple karena kesalahan pengelolaan pemerintah disebabkan oleh kesalahan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, yang dapat disebabkan oleh salah satu hal berikut:

Boleh dikatakan belanja pemerintah lebih besar dari belanja nasional. Pengeluaran-pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua golongan besar, yakni Perekonomian Indonesia Dalam Prespektif Waktu. Pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan yang sifatnya sulit untuk dikurangi (Hadi Susastro 2005:193). Hal ini menyebabkan inflasi berkelanjutan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran pembangunan yang bersifat non-pembangunan

atau pengeluaran yang tidak menambah jumlah produksi secara langsung bersumber pengeluaran yang sangat besar.

Kesepakatan Manila, juga dikenal sebagai Aliansi Malaysia, Filipina, dan Indonesia, atau MAPHILINDO, adalah kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebelum konflik terjadi. Kontrak itu ditandatangani oleh Presiden Macapagal Aroyo Food Filipina, Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman, dan Presiden Ir. Sukarno. Saat itu, Malaysia sengaja mengingkari perjanjian dengan tetap mendukung Inggris. Akibatnya, Indonesia memandang Malaysia telah melanggar perjanjian dan khawatir bahwa pembentukan Federasi Malaya yang dilakukan Inggris dengan gaya kolonial baru yang dikenal sebagai "Neo kolonialisme dapat membahayakan kemerdekaan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebrandio, menyuarakan pendapat negatif terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Belakangan, Jenderal Nasution mengirimkan pasukan melintasi perbatasan untuk memperkuat pernyataan tersebut. Sarawak. Akhirnya pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan dengan Malaysia. Namun, ada juga pengunjung rasa asal Malaysia di Kuala Lumpur pada hari itu, yang menyatakan sentimen anti-Indonesia. Hal ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada saat itu dan pengiriman pasukan tidak sah untuk menyerang Malaysia (Imam, 2005: 256)

Sukarno presiden Indonesia saat itu, marah atas tindakan aparat anti-Indonesia di Malaysia yang menginjak-injak lambang negara. Sukarno akhirnya melakukan pembalasan dengan menggunakan gerakan ini. ditetapkan sebagai Malaysia Ganyang. Operasi militer di Kalimantan telah menimbulkan permasalahan bagi keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Akhirnya pada tahun 1964, Indonesia melancarkan serangan yang dikenal dengan nama Komando Rakyat Dwi (DWIKORA) untuk mencegah terbentuknya Federasi Malaysia (Sunarti 2014:65-80).

Faktor-Faktor Ganyang Malaysia

Konflik antara Malaysia dan Indonesia tentu ada penyebabnya. Konflik antara Indonesia dan Malaysia merupakan konfrontasi langsung yang terjadi di kawasan yang sama—Asia Tenggara—yang menjelaskan alasannya. Meskipun Malaysia melanggar Perjanjian Manila (Manila Accord), tidak terjadi perang teritorial (regional) di Asia Tenggara sebagai akibat dari situasi tersebut. Namun, patuhlahMeningat Indonesia merupakan negara dengan Partai Komunis terbesar ketiga di luar wilayah komunis setelah Uni Soviet dan RRT, penulis menyatakan bahwa konfrontasi tersebut diakibatkan oleh blok Timur dan Barat yang memainkan politik domino (Srijanto 2010). Penulis secara khusus menyebutkan bahwa Inggris dan Amerika di blok Barat khawatir jika Indonesia bergabung dengan Blok Timur, maka hal itu akan terjadi. Menurut Marwati Djoened (2010) Ada beberapa faktor berbeda yang menyebabkan perbedaan konvensi antara Malaysia dan Indonesia, Faktor ini juga bisa berasal dari luar maupun dalam. Berikut faktor-faktor yang berasal dari Indonesia:

Faktor internal Indonesia

1. PKI mempunyai sejarah yang kuat dalam menentang ideologi dan politik konfrontatif.
2. NASAKOM, yaitu Ir. diciptakan oleh Sukarno.
3. Presiden Soekarno ingin memasukkan Amerika Serikat ke dalam wilayah NKRI.
4. TNI-AD mendukung penggunaan politik konfrontasi sebagai taktik untuk mengimbangi PKI.
5. Protes anti-Indonesia di Malaysia membuat marah Sukarno dengan menginjak lambang negara Indonesia, dan

Soekarno menanggapi dengan memulai kampanye Ganyang Malaysia sebagai balasannya.

6. Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dan bisnis dengan Malaysia.
7. Karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar, adanya penutupan perekonomian menyebabkan terjadinya perdagangan ilegal.

Faktor eksternal Indonesia:

1. Sehubungan dengan penunjukan Malaysia selanjutnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB menyusul upaya menjadi anggota PBB
2. Keamanan PBB. Hal ini kemudian memaksa Indonesia keluar dari forum PBB.
3. Kesepakatan Manila yang disetujui oleh Filipina, Indonesia, dan tiga kawasan lainnya telah dilanggar oleh Malaysia.
4. Federasi Malaysia tidak dibentuk atas undangan Indonesia ke Malaysia.
5. Pengaruh kemauan Amerika dan Inggris terhadap sentimen politik local
6. Politik domino dipraktikkan di Asia Tenggara

Narasi Konfrontasi dalam Kajian Sejarah

Kajian sejarah yang menceritakan kembali peristiwa perselisihan Indonesia-Malaysia pada tahun 1963–1966 menyoroti beberapa titik tekanan antara kedua negara. Sudut pandang penulis Suwirta (2010:252) memberikan contoh pengutipan sudut pandang pada kajian sejarah Malaysia level 3 dan level 5 sambil menceritakan kejadian konfrontasi. kajian tersebut menekankan pentingnya belajar dari peristiwa masa lalu untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, demi

kepentingan mahasiswa di sana, analisis yang disajikan dalam kajian ini diusahakan menyeluruh dan tidak memihak.

Karakter dari Malaysia saja bukanlah satu-satunya yang diperkenalkan dalam buku teks sejarah Malaysia; tokoh yang berasal dari Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa agresif, antara lain Tunku Abdul Rahman dan Tunku Abdul Razak, tidak begitu dikenal atau ditinggikan dalam buku-buku sejarah Indonesia (Suwirta, 2010: 253). Mengenai konten yang terdapat dalam buku teks sejarah, baik di Indonesia maupun Malaysia, jumlah informasi tentang konfrontasi cukup sedikit dibandingkan dengan sumber lain yang tersedia.

Memperluas perekonomian, Pandangan politik yang konfrontatif bukan satu-satunya isu yang kian bertambah jumlahnya. datang ke pemerintah Indonesia, termasuk isu-isu pertahanan saat ini, yang tidak benar; yang lainnya adalah konflik dengan Malaysia. Sejak saat itu, masalah dengan Malaysia pada dasarnya telah hilang. Hal ini juga berdampak pada permasalahan perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia harus menghadapinya.

Kompleksitas permasalahan perekonomian meningkat antara tahun 1963 dan 1965. Permasalahan utama tersebut adalah: Pertama, meningkatnya inflasi menyebabkan kenaikan harga pangan, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Kedua, meningkatnya impor beras mengurangi cadangan devisa yang dimaksudkan untuk pembangunan (Suroso 1997:92).

Taktik agresif dan sikap anti-nekolim yang dilakukan Presiden Soekarno tidak mengubah cara pandanganya terhadap persoalan Malaysia. Karena keyakinan Presiden Soekarno bahwa Malaysia adalah contoh nekolim yang tidak boleh ada, maka pemerintah Indonesia telah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk menyelesaikan permasalahan Malaysia. Meskipun kondisi ekonomi semakin melemah, pemerintah Indonesia mengeluarkan biaya yang besar dan meningkat

setiap tahunnya. Kenyataannya, kebijakan moneter pemerintah sejak tahun 1965 seringkali menimbulkan inflasi karena disparitas antara jumlah uang beredar dan defisit. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran yang luar biasa (Hasan, 2003: 302).

Ending Ganyang Malaysia

Kekalahan Indonesia dalam Konfrontasi Sebagaimana dijelaskan dalam artikel ini, konfrontasi Malaysia-Indonesia akhirnya berakhir dengan kekalahan Indonesia. Hal ini terjadi setelah adanya kudeta G30S/PKI dan peralihan kepemimpinan Indonesia ke Soeharto pada tahun 1965-1966. Kudeta G30S/PKI secara signifikan melemahkan posisi Presiden Soekarno dan partai komunis (PKI) yang menjadi pendukung utama kebijakan "Ganyang Malaysia". Sementara itu, Soeharto yang naik sebagai pemimpin baru Indonesia memilih untuk mengakhiri konfrontasi dan memperbaiki hubungan dengan Malaysia (Ricklefs:2007). Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami kekalahan dalam konfrontasi ini, Keterbatasan sumber daya dan kemampuan militer Indonesia Indonesia tidak mampu mempertahankan momentum operasi militer jangka panjang melawan Malaysia yang didukung oleh Inggris dan sekutu-sekutunya. Isolasi Indonesia di forum internasional, Upaya diplomasi Indonesia untuk menggali dukungan internasional tidak berhasil. Sebaliknya, Malaysia mendapatkan dukungan dari Inggris dan negara-negara Barat lainnya. Instabilitas politik dalam negeri Indonesia Kondisi politik dalam negeri Indonesia yang tidak stabil setelah kudeta G30S/PKI turut melemahkan kemampuan pemerintah untuk melanjutkan konfrontasi. Setelah kekalahan Indonesia, konfrontasi Malaysia-Indonesia akhirnya berakhir. Hal ini membawa dampak, baik negatif maupun positif, bagi hubungan kedua negara di masa depan. Secara negatif, konfrontasi ini memperburuk hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam jangka waktu yang cukup lama (Nasution:1966). Namun di sisi lain, peristiwa ini juga menyadarkan pentingnya membangun hubungan yang lebih baik

berdasarkan saling pengertian dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Secara keseluruhan, "Ending Ganyang" atau akhir dari Konfrontasi Malaysia-Indonesia merupakan pembelajaran berharga bagi Indonesia dan Malaysia untuk mengelola hubungan regional di Asia Tenggara dengan lebih bijaksana di masa mendatang.

KESIMPULAN

Konfrontasi Malaysia-Indonesia terjadi pada periode 1963-1966, merupakan konflik politik dan militer antara Indonesia dan Malaysia. Konfrontasi ini dipicu oleh penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang digagas oleh Inggris. Indonesia menganggap Federasi Malaysia ini sebagai perpanjangan dominasi kolonial Inggris di wilayah Asia Tenggara. Kebijakan "Ganyang Malaysia" Untuk menghalangi pembentukan Federasi Malaysia, Indonesia meluncurkan kebijakan "Ganyang Malaysia" yang mencakup berbagai upaya, yaitu: Operasi militer, dengan mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan infiltrasi dan penyerangan di perbatasan Malaysia, Propaganda, dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan resmi pemerintah Indonesia yang menolak dan mengecam pembentukan Federasi Malaysia. Diplomasi, dengan melakukan lobi dan tekanan politik di tingkat internasional agar Federasi Malaysia tidak terbentuk. Konfrontasi Malaysia-Indonesia akhirnya berakhir dengan kekalahan Indonesia, setelah terjadinya kudeta G30S/PKI dan peralihan kepemimpinan Indonesia ke Soeharto. Kegagalan konfrontasi ini memberikan dampak negatif bagi hubungan Indonesia-Malaysia, namun di sisi lain juga memperkuat semangat nasionalisme Indonesia. Peristiwa Konfrontasi Malaysia-Indonesia merupakan bagian penting dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. Konfrontasi ini mencerminkan

persaingan politik dan ideologis di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin, serta menunjukkan upaya Indonesia untuk mempertahankan pengaruh regionalnya. Dampak Konfrontasi Malaysia-Indonesia tidak hanya memberikan dampak negatif bagi hubungan bilateral kedua negara, namun juga menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Operasi militer yang dilakukan Indonesia di perbatasan mengakibatkan tewasnya para tentara dan warga sipil dari kedua belah pihak. Selain itu, konfrontasi ini juga memberikan tekanan ekonomi bagi Indonesia. Upaya "Ganyang Malaysia" yang dilakukan Indonesia menguras sumber daya dan anggaran negara, pada saat perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi sulit. Salah satu faktor penting yang mendorong Indonesia melakukan konfrontasi adalah keinginan untuk mempertahankan pengaruh regionalnya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap mengancam dominasi Indonesia di kawasan ini. Selain itu, konfrontasi juga dilatarbelakangi oleh ambisi Presiden Soekarno untuk mewujudkan cita-cita "Lingkaran Luar" yang bertujuan membebaskan negara-negara di sekitar Indonesia dari pengaruh asing. Meski berakhir dengan kekalahan Indonesia, peristiwa Konfrontasi Malaysia-Indonesia memberikan pembelajaran berharga bagi hubungan bilateral kedua negara di masa depan. Konflik ini menunjukkan perlunya upaya diplomasi dan dialog yang lebih intensif untuk menyelesaikan perselisihan. Konfrontasi juga menyadarkan pentingnya membangun saling pengertian dan menghormati kedaulatan masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Nasution (1966). Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata. Jakarta : Mega Bookstore
- Adam, Cindy, (1965) Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II. Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1965
- DEPPEN RI, (1964)., Glora Konfrontasi Mengganyang Malaysia, Jakarta : DEPPEN RI.

- Ganis Harsono, (1989) Cakrawala Politik Era Soekarno. Jakarta : CV Haji Masagung.
- Hadi Susastro, dkk, (2005) Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir. Jilid II 1959-1966, Jogjakarta:Kanisius.
- Hamid, A., dan Madjid, M. (2014). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasan, S. H. (2003). Strategi Pembelajaran Sejarah pada Era Otonomi Daerah sebagai Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. In Andi Suwirta & H. Sjamsuddin (ed.), *Historia Magistra Vitae: Menyambut 70 tahun Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, M.A.* Bandung: Historia Press.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.2121/sosiohumanika.v3i2.415>.
- John B. Srijanto. (2010). Ganyang Malaysia. Politik Konfrontasi Bung Karno. Yogyakarta: InterpreBook
- Kusumah Hadiningrat (1971) Sejarah Operasi Operasi Gabungan Dalam Rangka Dwikora. DEPHANKAM PUSJARA.
- LP3ES, (1995) Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah: Jakarta.
- Marwati Djoened, dkk, (2010) Sejarah Nasional Indonesia, jilid VI. Edisi Pemutakhiran, Jakarta : Balai Pustaka.
- Ricklefs , MC, (2007) Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : Serambi.
- Sofyan Saleh, dkk (2000). Perekonomian Indonesia Dalam Prespektif Waktu, Jakarta: Pamator.
- Suroso. (1997) Perekonomian Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suwirta, A. (2010). Dua Negara Bangsa Melihat Masa Lalunya: Konfrontasi IndonesiaMalaysia Sebagaimana Dikisahkan dalam Buku-Buku Teks Sejarahnya di Sekolah. *Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 3(2), 243±258.